

PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM DALAM MENDUKUNG UMKM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI LOKAL YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Authors:

Tekla Rensiana Toyo¹, Asfarony Hendra Nazwin², Muh Rivandy Setiawan³

e-Mail:

encyk2002@gmail.com¹, asfarony@ummat.ac.id², muhrivandysetiawan@gmail.com³

Affiliation:

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia¹

Received : Agustus, 07, 2024
Revised : December, 28, 2024
Accepted : December 29, 2024
Available Online: Des 31, 2024

Corresponding author

Tekla Rensiana Toyo
Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
encyk2002@gmail.com

ABSTRAK

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data menunjukkan adanya 22.473 usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di wilayah ini, mencerminkan kontribusi besar UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Fenomena ini mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan, antara lain pelatihan kewirausahaan, pemberian modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta fasilitasi pemasaran produk. Upaya tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur komprehensif, didukung oleh data administrasi daerah dan hasil-hasil penelitian ilmiah sebelumnya. Analisis ini difokuskan pada proses implementasi kebijakan, efektivitas program yang dilaksanakan, serta dampak langsungnya pada perekonomian lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah di bidang pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. Secara khusus, peningkatan kapasitas kewirausahaan dan kemudahan akses modal berkontribusi pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, partisipasi UMKM dalam program dukungan pemasaran terbukti menguatkan daya saing produk lokal di pasar regional. Dengan demikian, program pemberdayaan UMKM yang terarah menjadi kunci dalam membangun ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi lokal di masa mendatang.

Kata kunci: Peran Pemerintah Kota Mataram, Pemberdayaan, dan UMKM

Abstract

MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) play a significant role in economic development in Mataram City, West Nusa Tenggara Province. Data shows that there are 22,473 micro, small, and medium enterprises operating in this area, reflecting the major contribution of MSMEs to local economic growth. This phenomenon has encouraged the Mataram City Government to develop various empowerment programs, including entrepreneurship training,

providing capital through People's Business Credit (KUR), and facilitating product marketing. These efforts are in line with Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs which emphasizes the importance of the role of MSMEs in encouraging equality and economic growth. This study aims to analyze the extent to which local government policies influence MSME empowerment in Mataram City. The research method used is a comprehensive literature study, supported by regional administrative data and previous scientific research results. This analysis focuses on the policy implementation process, the effectiveness of the programs implemented, and their direct impact on the local economy. The results of the study indicate that government initiatives in the fields of training, financing, and marketing have a positive impact on MSME growth. In particular, increasing entrepreneurial capacity and easy access to capital contribute to reducing unemployment rates and improving community welfare. In addition, MSME participation in marketing support programs has been proven to strengthen the competitiveness of local products in regional markets. Thus, targeted MSME empowerment programs are key to building a more inclusive and sustainable regional economy. These findings are expected to be a reference for stakeholders in formulating strategies and policies for local economic development in the future.
Keywords: Role of Mataram City Government, Empowerment, and MSMEs

Pendahuluan

Pemberdayaan, dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu instrumen strategis yang dimiliki pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur sosial di setiap wilayah. Istilah “pemberdayaan” merujuk pada upaya memberikan daya atau kemampuan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, melalui peningkatan pengetahuan, akses modal, perlindungan hukum, serta dukungan lain yang menyangkut kelangsungan usaha (Ramadhanti et al., 2022). Secara esensial, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat agar memiliki potensi dan kemandirian dalam mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Dalam jangka panjang, setiap daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memenuhi kebutuhannya secara lebih mandiri.

Menurut, Indra Dwi Permana (2021) Dalam tahap pemulihan ekonomi Indonesia, bidang UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan perekonomian yang dapat dilihat dari berbagai faktor. Pertama, UMKM tersebar di hampir semua sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, jasa, hingga industri kreatif. Kedua, potensi besar UMKM dalam hal penyerapan tenaga kerja membawa dampak langsung pada pengurangan tingkat pengangguran, terutama di wilayah yang belum banyak tersentuh sektor industri skala besar. Oleh karena itu, diperlukan rencana dan dukungan yang tepat dari pemerintah untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM, sehingga perkembangannya dapat selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional seharusnya dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, di mana pemerintah dan rakyat berperan secara sinergis. Rakyat, dalam hal ini pelaku UMKM, berperan sebagai aktor utama pembangunan melalui kreativitas dan ketekunan mereka menjalankan usaha. Pemerintah, di sisi lain, bertugas mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong perkembangan dunia usaha. Peran ganda pemerintah tersebut

mencakup regulasi, insentif, pemberian fasilitas kredit, hingga pelatihan dan pendampingan usaha. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan pertumbuhan UMKM dapat menjadi roda pendorong utama perekonomian daerah sekaligus menumbuhkan iklim kompetitif yang sehat.

Dalam praktiknya, upaya mengembangkan kebijakan bagi pertumbuhan UMKM memerlukan kejelasan definisi dan kriteria. Menurut Siti Nurhalita & Imsar(2022) UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi produktif milik satu orang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria tertentu, umumnya memiliki aset dan pendapatan tahunan yang relatif kecil. Usaha Kecil, yang juga merupakan kegiatan ekonomi produktif, berdiri secara mandiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar. Usaha Menengah, di sisi lain, ialah kegiatan ekonomi produktif yang berada di antara skala kecil dan besar, biasanya memiliki aset atau penjualan tahunan yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro dan kecil, namun tetap tidak terafiliasi sebagai bagian dari perusahaan besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembagian ini penting untuk menentukan skema kebijakan yang tepat, seperti besaran pajak, kriteria penerima bantuan, serta program pelatihan yang sesuai dengan skala usaha tersebut.

Dengan menyadari pentingnya peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dan mendorong kemajuan ekonomi lokal maupun nasional. Pemberdayaan yang efektif dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian bantuan modal, pelatihan manajemen usaha, hingga pembangunan jaringan pemasaran yang luas. Bantuan modal, misalnya, dilakukan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan suku bunga relatif rendah. Selain itu, pendampingan dari pemerintah juga dapat berupa pelatihan kewirausahaan, seminar pemasaran digital, hingga pertemuan bisnis (business matching) guna mempertemukan UMKM dengan pembeli potensial.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu contoh konkret di mana peran UMKM sangat menonjol dalam roda perekonomian lokal. Berdasarkan data pada tahun 2022, tercatat 103.284 unit UMKM formal di Provinsi NTB. Angka tersebut terdiri atas 86.922 unit usaha mikro (sekitar 84%), 15.119 unit usaha kecil (15%), dan 1.243 unit usaha menengah (1%). Dominasinya jelas terlihat pada usaha mikro yang mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan UMKM. Fakta ini menunjukkan masih sangat besarnya potensi dan ruang untuk pengembangan usaha pada skala mikro, yang kerap kali beroperasi dengan aset dan modal terbatas, serta membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. Hal ini sesuai dengan data yang termuat di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah dan Skala Usaha Mikro, Kecil Menengah PerKabupaten/ Kota Di Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lombok Barat	16,635	0	0	16,635
2	Lombok Tengah	309	11	3	323
3	Lombok Timur	14,356	6,390	284	21,030
4	Sumbawa	5,501	4	3	5,508

5	Dompu	2,261	5	4	2,270
6	Bima	11,610	0	0	11,610
7	Sumbawa Barat	7,780	49	0	7,829
8	Lombok Utara	4,820	173	5	4,998
9	Kota Mataram	15,746	6,194	533	22,473
10	Kota Bima	7,904	2,293	411	10,608
Jumlah		86,922	15,119	1,243	103,284

Sumber : <https://data.ntbprov.go.id>

Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa Kota Mataram mempunyai peran penting untuk mendorong kemajuan UMKM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk. Dengan jumlah UMKM yang kian bertambah, pemerintah daerah setempat diharapkan mampu merumuskan strategi komprehensif yang mencakup pelatihan, pendanaan, dan promosi secara masif. Di level praktis, hal ini dapat dilihat dari program pemerintah yang mengencangkan pelatihan kewirausahaan, seperti pelatihan produksi, manajemen, distribusi, hingga pemasaran online. Langkah ini selaras dengan tuntutan era digital, di mana pemanfaatan teknologi informasi menjadi krusial untuk memperluas jangkauan pasar serta mendorong peningkatan efisiensi produksi.

Dalam kerangka tersebut, intervensi pemerintah menjadi sangat dibutuhkan untuk menjembatani tantangan dan hambatan yang kerap dihadapi pelaku UMKM. Berbagai penelitian dan laporan lapangan menunjukkan sejumlah kendala, misalnya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi kewirausahaan, minimnya akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, hingga kesulitan dalam memasarkan produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Pemerintah Kota Mataram diharapkan dapat berperan memberikan insentif, memfasilitasi kemitraan dengan investor, dan menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan guna menyediakan sarana pembiayaan yang mudah diakses. Selain itu, berbagai kegiatan pameran (expo) atau misi dagang antarwilayah dapat membantu UMKM mempromosikan produknya ke pangsa pasar yang lebih luas.

Langkah-langkah ini tidak terlepas dari harapan utama: mewujudkan perekonomian lokal yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, ketika UMKM semakin berkembang, akan muncul efek berganda (multiplier effect) pada perekonomian. Misalnya, tumbuhnya lapangan kerja baru akan menurunkan tingkat pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat lokal akan merangsang perputaran ekonomi yang lebih cepat. Hal ini akan berdampak pada kenaikan pendapatan daerah, yang kemudian dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang dan peningkatan kualitas layanan publik.

Penelitian ini, oleh karena itu, memiliki tujuan yang jelas: memahami sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian lokal Kota Mataram. Adanya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan UMKM di kota ini, khususnya mengingat posisi strategisnya di Provinsi NTB, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menelurkan kebijakan inovatif. Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya menumbuhkan jumlah UMKM semata, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas, diversifikasi produk, serta kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk skala nasional dan internasional.

Melalui penelitian ini, diharapkan tersaji gambaran komprehensif tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam mendorong UMKM, apa saja hasil yang telah dicapai, dan tantangan apa yang masih perlu diatasi. Dengan memotret kondisi lapangan dan mengkaji berbagai literatur, baik akademik maupun kebijakan, kajian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal terletak pada kesesuaian program pemerintah dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi persoalan yang paling mendesak, seperti kurangnya akses modal atau keterbatasan pemasaran, kemudian merumuskan solusi yang tepat dan terukur.

Di samping itu, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting. Pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi bisnis, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta komunitas setempat perlu bersatu untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Perguruan tinggi, misalnya, dapat berkontribusi dengan memberikan pendampingan teknis dan riset pasar, sementara lembaga keuangan dapat menawarkan skema pembiayaan inovatif. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak sekadar bersandar pada ketersediaan dana pemerintah, tetapi juga memanfaatkan sumber daya eksternal secara optimal.

Keseluruhan upaya ini akan bermuara pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan pelaku UMKM. Ketika UMKM berhasil mengembangkan kapasitasnya, akan terbentuk pula struktur ekonomi daerah yang lebih merata, kuat, dan resilient. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, membangun daya saing di tingkat lokal merupakan prasyarat mutlak bagi upaya peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, fokus pemerintah Kota Mataram untuk memperkuat UMKM bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan berkontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, serta bagaimana hal itu berdampak pada perekonomian lokal kota Mataram. Dan memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan publik, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya, agar setiap langkah pemberdayaan dapat berbuah hasil yang konkret. Hanya melalui kerjasama, inovasi, dan strategi komprehensif, UMKM Kota Mataram dapat tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan, lebih luas lagi, ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi Mataram di level nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran, pencatatan, dan analisis fenomena yang komprehensif dalam konteks alaminya. Menurut Creswell (2014), metode kualitatif deskriptif sangat efektif untuk menangkap proses, konteks, dan makna rumit yang mendasari fenomena sosial, sehingga dapat mengungkap pengalaman dan perspektif subjektif partisipan. Dalam hal ini, desain deskriptif kualitatif memastikan bahwa detail yang bernuansa dan interkoneksi antarvariabel tidak diabaikan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang kompleksitas subjek yang diteliti (Flick, 2018). Pengumpulan data untuk penelitian ini terutama bergantung pada

metode tinjauan pustaka, di mana berbagai sumber informasi—seperti artikel yang ditinjau sejawat, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan—diperiksa untuk menyusun pengetahuan terkini tentang topik penelitian.

Proses ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mencari, memilih, dan menganalisis literatur, yang didasarkan pada kerangka kerja inklusi dan eksklusif yang terstruktur. Dengan menilai secara kritis kualitas dan relevansi setiap sumber, peneliti dapat menyusun kumpulan bukti yang kuat yang mencerminkan perspektif teoritis yang mapan, temuan empiris, dan kemajuan metodologis dalam bidang tersebut (Yin, 2009). Selanjutnya, data yang diperoleh dari berbagai sumber ini dievaluasi dan disintesis, berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Lensa holistik ini memastikan bahwa lingkungan yang lebih luas dan dinamika tingkat mikro dalam fenomena tersebut diperhitungkan.

Hasil Dan Pembahasan

Temuan penelitian ini menggarisbawahi peran penting inisiatif pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram, di mana 22.473 perusahaan—terdiri dari 15.746 usaha mikro, 6.194 usaha kecil, dan 533 usaha menengah—secara kolektif merangsang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sejalan dengan perspektif Chambers (1995) tentang pembangunan partisipatif, tingginya volume UMKM di Mataram tidak hanya menggambarkan bergairahnya ekonomi wilayah tersebut tetapi juga menunjukkan potensi substansial kota tersebut untuk menciptakan kesempatan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Data dari wawancara dan catatan administratif menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah, yang meliputi program pelatihan dan pendampingan, skema pinjaman berbunga rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan dukungan pemasaran produk, telah berhasil mengkatalisasi aktivitas kewirausahaan, sehingga memperkuat gagasan bahwa intervensi pemerintah yang terstruktur dengan baik dapat secara efektif mengurangi hambatan yang menghambat pengembangan UMKM. Meskipun landasan hukum untuk intervensi ini berakar pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, hasil praktis di Kota Mataram mencerminkan teori pembangunan yang lebih luas, khususnya teori yang menyatakan bahwa strategi tata kelola lokal dapat menghasilkan tingkat efektivitas kebijakan yang lebih tinggi dengan mengatasi kendala khusus wilayah. Misalnya, Carter dan Barrett (2006) berpendapat bahwa intervensi pengembangan kapasitas, jika selaras dengan konteks lokal, memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk mengatasi perangkat klasik berupa produktivitas rendah dan penetrasi pasar terbatas.

Dalam kasus Kota Mataram, keselarasan ini terwujud dalam berbagai cara. Pertama, program pengembangan kapasitas yang dipimpin pemerintah menawarkan pelatihan kontekstual kepada para wirausahawan, yang mencakup bidang-bidang seperti manajemen keuangan, pemasaran, literasi digital, dan inovasi produksi. Program-program ini bergantung pada premis bahwa perolehan pengetahuan sangat penting untuk meningkatkan operasi bisnis internal, memaksimalkan alokasi sumber daya, dan beradaptasi dengan pasar yang semakin kompetitif. Kedua, integrasi komponen pendampingan semakin memperkuat pendekatan pengembangan kapasitas ini. Kehadiran mentor lokal dengan pengetahuan khusus industri mendorong terciptanya ekosistem yang mendukung para wirausahawan untuk saling

bertukar pengalaman, beradaptasi dengan fluktuasi pasar, dan menyempurnakan model bisnis mereka. Selain itu, jaringan mentoring ini membantu mengurangi asimetri informasi dan mengurangi keengganan mengambil risiko—faktor-faktor yang sering kali menghalangi UMKM untuk mengeksplorasi praktik inovatif atau memperluas operasi mereka di luar pasar lokal.

Selain pelatihan dan mentoring, ketersediaan layanan keuangan yang mudah diakses—seperti KUR—berperan penting dalam memberdayakan UMKM. Bukti empiris menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap modal sering kali menghambat pertumbuhan usaha, terutama di segmen skala mikro dan kecil. Dengan menetapkan program pinjaman dengan suku bunga yang relatif rendah dan persyaratan yang fleksibel, pemerintah Kota Mataram secara efektif menurunkan hambatan masuk bagi calon wirausahawan dan memungkinkan UMKM yang ada untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa inklusi keuangan merupakan aspek integral dari pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena mendemokratisasi peluang dan mempersempit kesenjangan sosial. Dampak berlipat ganda dari kebijakan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah UMKM yang mempekerjakan tenaga kerja lokal, berinvestasi pada peralatan yang lebih baik, dan berinovasi dalam hal desain dan pengemasan produk. Seiring berjalannya waktu, hal ini berkontribusi pada basis ekonomi yang lebih beragam dan tangguh di Mataram, sehingga mengurangi kerentanan kota terhadap kemerosotan sektor tertentu.

Bagian integral lain dari strategi pemerintah Kota Mataram melibatkan fasilitasi pemasaran produk melalui pameran dagang yang terorganisasi, pasar digital, dan promosi di seluruh wilayah. Cleary dan Quinn (2016) telah menyoroti kekuatan transformatif e-pemerintahan dan aplikasi digital dalam meningkatkan transparansi dan kemanjuran layanan publik. Dalam konteks pengembangan UMKM, platform digital memungkinkan produsen untuk menjangkau konsumen jauh melampaui lokasi terdekat mereka, melampaui hambatan geografis yang sebelumnya membatasi akses pasar.

Inisiatif promosi Kota Mataram memberi UMKM visibilitas, membantu mereka menembus pasar yang lebih luas dan menjalin kemitraan rantai pasokan baru. Misalnya, dengan berpartisipasi dalam pameran regional atau memanfaatkan platform daring, para pengusaha dapat mendiversifikasi basis pelanggan mereka, mempelajari preferensi konsumen, dan terlibat dalam jaringan kolaboratif dengan bisnis yang lebih besar atau investor eksternal. Mekanisme dukungan pemasaran ini memperkuat sinergi antara kebijakan publik dan kewirausahaan swasta, yang menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah dapat bertindak sebagai batu loncatan bagi UMKM untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dampak agregat dari kebijakan ini tercermin dalam perluasan Mataram.

Kesimpulan

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Kota Mataram. Data menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri atas 22.473 bidang usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kota Mataram. Pemerintah daerah Kota Mataram telah berperan aktif dalam memacu pemberdayaan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan. Kebijakan ini

mencakup pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, pemberian modal usaha melalui KUR, serta fasilitasi pemasaran produk UMKM. Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah Kota Mataram berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Banyak UMKM yang mampu berkembang dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Mataram. Dampak ekonominya antara lain penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada penurunan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afilaily, N. (2022). Peran Sentra Batik Tulis dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Etheses IAIN Kediri*, 16–35.
- Carter, M. R., & Barrett, C. B. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. *Journal of Development Studies*, 42(2), 178-199.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204
- Cleary, S., & Quinn, M. (2016). The transformative power of e-governance: Fostering transparency, efficiency, and accountability. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 3(4), 1-15.
- Creswell, J. W. (2014). **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches** (4th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). **Doing Triangulation and Mixed Methods**. SAGE Publications.
- Indra Dwi Permana. (2021). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan). *Journal of Management and Bussines*, 75–79.
- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 1(1), 1–13. https://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis.AN.6118_Sup_p.pdf
- Prastika, H. C. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(Umkm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. *Fisip*, 1–12.
- Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Umkm Batik Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 16(1), 47–52. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.23452>
- Siti Nurhalita, & Imsar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 84–90. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2282>
- Yin, R. K. (2009). **Case Study Research: Design and Methods** (4th ed.). SAGE Publications.